

PERPINDAHAN PENDUDUK DALAM TIGA MASA: KOLONISASI, KOKUMINGGAKARI, DAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI LAMPUNG (1905-1979)

*MIGRATION IN THREE PERIODS: COLONIZATION, KOKUMINGGAKARI,
AND TRANSMIGRATION IN LAMPUNG PROVINCE
(1905-1979)*

M. Halwi Dahlan

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung
e-mail: karaengalwi@gmail.com

Naskah Diterima: 6 Juni 2014

Naskah Direvisi: 2 Juli 2014

Naskah Disetujui: 8 Agustus 2014

Abstrak

Kolonisatie adalah program perpindahan penduduk versi pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Program migrasi ini awalnya diberi nama *Kolonisatieproof* dan dijalankan sesuai dengan tuntutan Politik Etis bersama dengan program edukasi dan irigasi. Meski kelihatannya sebagai program yang peduli terhadap perbaikan kondisi masyarakat pribumi, tetapi sejatinya ketiga program tersebut dilaksanakan untuk kepentingan kolonialisme di Hindia Belanda yang telah sekian lama meraup keuntungan sejak masa VOC dan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan militer Jepang juga dilakukan perpindahan penduduk yang disebut *kokuminggakari* khusus di wilayah Lampung. Penduduk yang dipindahkan ini adalah para *rômusha* dari Pulau Jawa. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, program perpindahan penduduk ini dilanjutkan dan disebut transmigrasi. Tidak jauh berbeda dengan kolonisasi, sasaran perpindahan penduduk ini adalah dari daerah-daerah yang dianggap padat penduduknya terutama Pulau Jawa ke daerah lain di Indonesia. Khusus Lampung, pelaksanaan perpindahan penduduk ini sangat bernilai karena daerah ini menjadi pionir proyek di tiga masa pemerintahan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tiga peristiwa perpindahan penduduk tersebut disertai perbandingan di antara ketiganya. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan sumber melalui studi kepustakaan dan mengenai dampak yang ditimbulkan dianalisis menggunakan teori integrasi.

Kata kunci: kolonisasi, *kokuminggakari*, transmigrasi, sejarah.

Abstract

In the early twentieth century, the Netherland-Indie government introduced a program Kolonisatie. At the beginning of its implementation, that program was know as Kolonisatieproof. The program is run in accordance with the Ethical Policy along with educational and irrigation program. Although it seems as programs that concerned to the improvement of indigenous peoples, but is actually that programs were implemented for the benefit of the Dutch East Indies's colonialism. In the reign of the Japanese military, migration program also conducted by goverment which known as kokuminggakari, especially in Lampung. The Population which displacement in kokuminggakari's program is the romushas of Java. After the independence of the Republic of Indonesia, this program continued and know as migration and transmigration. In the era of Indonesian independence, the government carried out the similar program with the colonization program. The purpose of this program is to moved the population from the densely region, especially in Java, to moved to other region in Indonesia. In Lampung, the implementation of this migration is very important because the area has become a pioneer project in three periods. The purpose of this research was to describe the migration of three events with a

comparison between the three events. This study uses the source collection techniques through the study of literature and the data were analyzed using the theory of integration.

Keywords: *colonization, kokuminggakari, transmigrasi, history.*

A. PENDAHULUAN

Didahului dengan program *Kolonisatieproof* pemerintah Hindia Belanda melaksanakan perpindahan penduduk pada awal abad XX. Percobaan pertama yang sukses kemudian dilanjutkan dengan program perpindahan penduduk berikutnya yang disebut kolonisasi dan meluas tidak hanya di Lampung tetapi juga daerah lain di Pulau Sumatera, sampai akhirnya mereka menyerah kepada Jepang menjelang pertengahan abad XX.

Pelaksanaan kolonisasi dilanjutkan oleh pemerintah militer Jepang kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia melalui program transmigrasi, bahkan di masa Orde Baru dibentuk lembaga negara yang mengurus perpindahan penduduk ini, yaitu Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Tulisan ini perlu diangkat, karena pernah terjadi di satu wilayah dengan pembeda pada profil pemerintahan masing-masing. Dua masa pemerintahan sebelumnya adalah pemerintahan kolonial dan pendudukan atau lazim disebut penjajahan dan satu pemerintahan berikutnya diperoleh dari hasil proklamasi kemerdekaan sehingga tulisan ini mendeskripsikan satu program pemerintah pada tiga situasi pemerintahan berbeda. Permasalahan utama tulisan ini adalah perbedaan antara kolonisasi, *kokuminggakari*, dengan transmigrasi kemudian analisis dampak dilaksanakannya tiga program pemerintah ini sebagai perkembangan dari permasalahan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Cara pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kajian kepustakaan. Sumber kepustakaan yang ada dan relevan kemudian diolah bersama sesuai dengan metode penelitian dan penulisan sejarah seperti yang diuraikan

Louis Gottschalk (1986:18) yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan kemudian dipilih menjadi sumber tulisan. Dalam menggambarkan suasana kolonisasi, literatur yang digunakan adalah makalah Schalkwijk (1918) dan tulisan Heyting (1938) dalam buku *De Indische Gids*. Kedua bahan pustaka ini menyajikan deskripsi pelaksanaan kolonisasi terutama Heyting karena pernah dipercaya melakukan penelitian sebelum *kolonisatieproof* dilaksanakan. Pada bagian mobilisasi tenaga kerja masa pendudukan militer Jepang, buku yang dijadikan panduan adalah tulisan Aiko Kurasawa (1993) yang menggambarkan proses pengerahan penduduk untuk menjadi tenaga kerja dan bagaimana kondisi mereka ketika menjadi *rômusha*, sedangkan mengenai program transmigrasi literatur menjadi bahan kepustakaan di antaranya adalah tulisan H.J. Heeren (1979). Literatur lain menjadi pelengkap informasi yang relevan dengan tulisan ini. Hasilnya adalah terwujudnya suatu historiografi yang terangkum dalam metodologi sejarah (Kuntowijoyo, 1999: 81) yang bersifat deskriptif analisis.

Dalam menganalisis digunakan perbandingan antara kolonisasi yang dilaksanakan dengan batasan waktu 1900-1942, kemudian pelaksanaan *kokuminggakari* oleh pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945, serta pelaksanaan transmigrasi dengan batasan waktu 1950-1979. Pembatasan antara tahun 1905 sampai 1942 adalah masa ketika pertama kali pemerintah Hindia Belanda melaksanakan migrasi hingga menjelang pergantian kekuasaan atas wilayah jajahan oleh pemerintah militer Jepang. Pembatasan kedua adalah masa kekuasaan pemerintah militer Jepang (1942-1945) di bekas wilayah peme-

rintahan Hindia Belanda. Pembatasan temporal ketiga adalah masa setelah Indonesia merdeka yang memindahkan penduduk dengan program transmigrasi dengan batasan 1950 hingga 1979. Pembatasan ini perlu dilakukan karena program transmigrasi khususnya di wilayah Provinsi Lampung telah dihentikan tetapi di daerah lain di Indonesia masih terus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pola dan jenis transmigrasi berbeda. Sedangkan batasan spasialnya adalah di wilayah Provinsi Lampung.

Adapun dampak dari program perpindahan penduduk tersebut akan diulas dalam bagian lain dari tulisan ini. Penulisan dampak diperlukan untuk melihat akibat dari penyebarluasan kelompok manusia yang juga berarti penyebarluasan kebudayaannya berhadapan dengan kelompok manusia lain dan kebudayaan yang sudah ada di tempat atau lokasi permukiman. Pendekatan yang digunakan adalah teori integrasi yaitu salah satu proses dan hasil kehidupan sosial yang menjadi alat dengan tujuan mengadakan suatu keadaan budaya yang homogen (Susanto, 1985:104). Teori ini diperoleh dari ilmu sosial sebagai ilmu bantu dalam menganalisis data kesejarahan.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. *Kolonisatieproof* dan Kolonisasi

Hindia Belanda yang menjadi negeri jajahan Kerajaan Belanda sesudah bangkrutnya VOC (31 Desember 1799) melaksanakan *etische politiek* setelah menguasai secara politik selama 100 tahun (1800-1900). Edukasi, irigasi, dan mobilisasi penduduk menjadi target utama pemerintah Hindia Belanda. Tetapi sebagai negeri jajahan penerapan politik etis tersebut berlangsung sangat terbatas. Irigasi didirikan untuk pengairan sawah dan kebun-kebun milik pemerintah maupun swasta. Jangkauan edukasi untuk rakyat pribumi dibatasi hanya kepada keturunan bangsawan dan pegawai pemerintahan. Mobilisasi penduduk yang

dilabeli tujuan pemerataan penduduk (pengisian lahan kosong untuk membuka daerah kawasan baru) tetapi sebenarnya bertujuan untuk menyempitkan wilayah kekuasaan adat. Demikian pula perpindahan penduduk ini dilakukan untuk mengantisipasi rawannya gerakan sosial yang mengancam pelaksanaan pemerintahan kolonial.

Gerakan sosial yang dikuatirkan tersebut sangat rentan terjadi berasal dari daerah yang padat penduduknya tetapi tidak berimbang dengan pemilikan tanah atau luasnya lahan garapan. Lainnya adalah pembangunan fisik seperti gedung dan jembatan yang tujuan utamanya adalah mempermudah mobilisasi pengaturan keadministrasian dan memperlancar pergerakan pasukan dari berbagai arah. Hal ini dilakukan karena pengalaman pemerintah Hindia Belanda yang membangun kawasan jajahan dengan cara agitasi dan intervensi militer berdampak pada kebencian penduduk lokal (terutama kaum bangsawan yang terampas kedudukan dan status sosialnya) terhadap mereka¹, seperti pada peristiwa Perang Diponegoro, Perang Paderi, dan peristiwa sosial di Banten tahun 1888.

Dalam bidang migrasi, menurut pemerintah Hindia Belanda, daerah-daerah di Pulau Jawa sudah semakin sesak terutama di wilayah Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan perpindahan penduduk. Berdasarkan data statistik tahun 1900 penduduk Pulau Jawa telah mencapai angka 28.746.638 jiwa kemudian meningkat drastis pada 1920 mencapai angka 34.984.171 jiwa. Jika memerhatikan angka-angka tersebut pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa masih belum terlalu tinggi kira-kira hanya

¹Sartono Kartodirdjo dengan gamblang menggambarkan kondisi konflik sosial di Banten yang berujung pada pemberontakan massal yang dipimpin kaum elit atau bangsawan. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

mencapai 2% saja, tetapi jika dibandingkan dengan luas pulaunya maka jumlah tersebut sangat menguatirkan karena pada tahun yang sama daerah lain di luar Pulau Jawa hanya mencapai angka 6.575.878 jiwa (Sudarno, 1996:2-3). Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Pulau Jawa tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan yang memadai².

Kolonisastieproof di Hindia Belanda dilaksanakan oleh suatu komisi yaitu *Central Commisie Voor Emigratie en Kolonisatie Van Imheemsen* (Komisi Pusat Emigran dan Kolonisasi Pribumi) (Alibasya, 1981:113). Latar belakang keinginan tersebut adalah adanya suatu brosur yang berisi tentang kondisi ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa dengan luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Sementara itu di luar Pulau Jawa justru terjadi sebaliknya, jumlah penduduknya relatif sedikit, sedangkan areal yang potensial untuk perkebunan dan pertanian masih sangat luas.

Brosur yang dirilis pada tahun 1889 oleh seorang kontrolir dari kalangan *Binnenlandsch Bestuur*³ bernama H.E.B

² Kondisi ini terjadi sebagai akibat politik Tanam Paksa (*cultur stelsel*) di masa van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830-1835). Pada masa tersebut banyak petani pemilik tanah yang menjadi buruh pabrik karena lahan pertanian mereka menjadi areal kebun tanaman khusus seperti kopi, tebu, dan nila. Sementara sebelumnya mereka menanam padi dan palawija (Kartodirdjo, 1973:8-10).

³ *Binnenlandsch Bestuur* (BB) adalah sebutan untuk para pemimpin dalam organisasi pemerintahan Hindia Belanda. BB terdiri dari Korps Pemerintahan Belanda (NBB) dan Korps Pemerintahan Pribumi (IBB). NBB semuanya adalah orang Belanda yang disebut *Nederlands Binnenlands Betuur* terdiri dari jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen, Kontrolir, dan Adspiran Kontrolir. IBB terdiri dari para bupati, patih, wedana, dan

Schmalhausen menyarankan untuk menekan jumlah penduduk di Pulau Jawa serta agar areal perkebunan di luar Pulau Jawa terpenuhi tenaga kerjanya, maka sebaiknya dilakukan perpindahan penduduk. Direktur *Binnenlandsch Bestuur* menanggapi usulan itu kemudian membuat rekomendasi tentang perlunya kolonisasi tersebut. Tahun 1903 atas laporan dan rekomendasi dari direktur tersebut Gubernur Jenderal Willem Rooseboom (1899-1904) kemudian membuat berbagai persiapan pelaksanaan program kolonisasi seperti menunjuk Residen Sukabumi H.G. Heyting untuk melakukan penelitian guna merealisasikan program perpindahan penduduk ini. Heyting lalu diberi tunjangan sebesar f. 600,- untuk penelitiannya. Penunjukan ini berlangsung pada bulan September 1902 (Sudarno, 1996:8).

Laporan hasil penelitian Heyting mengemukakan bahwa program kolonisasi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Dalam laporannya dikemukakan bahwa daerah-daerah yang dianggap layak untuk menjadi tujuan kolonisasi adalah di dalam Pulau Jawa seperti Banyuwangi, Jember, dan Karawang. Sedangkan di luar Pulau Jawa adalah Pulau Sumatera meliputi daerah-daerah di Sumatera Barat, Bengkulu, Palembang, dan Lampung. Total pengeluaran untuk pelaksanaan migrasi adalah f. 5.028.900 yang meliputi premi per kepala keluarga, transportasi, pembelian alat-alat dapur, alat-alat pertanian, pembangunan rumah tinggal bagi para emigran, pembangunan rumah petugas kesehatan (dokter dari kalangan pribumi), pengadaan bibit tanaman, gaji-gaji (dokter Jawa, kontrolir, asisten wedana, juru tulis, opas, mantri irigasi, kuli ukur, kepala desa, dan pamongpraja), biaya perjalanan (bagi petugas kesehatan, petugas keamanan, mantri irigasi, asisten wedana, juru tulis, dan kontrolir).

asisten wedana, semuanya adalah orang pribumi (Suriadinigrat, 1981 : 52-53).

Sedangkan rencana jumlah kepala keluarga yang dipindahkan selama sepuluh tahun adalah 5300 KK atau rata-rata 530 KK per tahun (Heyting, 1938: 1106-1117).

Laporan Heyting ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda termasuk laporan keduanya yang telah mencantumkan jumlah yang sebenarnya dari penduduk yang akan dipindahkan. Keberatan pemerintah terutama *Raad van Indie*⁴ adalah proyek sepuluh tahun tersebut terlalu "over" baik dari segi operasional apalagi jumlah dana yang akan digunakan. Awal abad XX masih sangat dekat dengan masa-masa pengambilan keuntungan sebesar-besarnya atas wilayah jajahan bagi negeri induk.

Awalnya keinginan pemerintah adalah membatasi perpindahan penduduk di dalam Pulau Jawa saja yaitu dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang lebih jarang, setelah itu baru diperluas ke luar Pulau Jawa. Namun demikian atas berbagai pertimbangan terutama realisasi Politik Etis di bidang migrasi dan menghindari kemubaziran hasil penelitian Heyting, dilakukan percobaan kolonisasi (*Kolonisatieproof*) dengan tujuan menetap. Program ini akhirnya terealisasi pada tahun 1905. Peristiwa ini terjadi ketika Hindia Belanda diperintah oleh Gubernur Jenderal ke-63, yaitu Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909).

Kolonisatieproof ini memilih penduduk Desa Bagelen dari Karesidenan Kedu sebagai pionir migrasi dan Gedongtataan di Distrik Lampung sebagai daerah tujuan. Alasan Kedu yang dipilih

adalah karena menurut pemerintah Hindia Belanda, Karesidenan Kedu kondisinya memprihatinkan dimana sering terjadi musim paceklik, kondisi tanah pertaniannya kurang potensial, serta sistem irigasinya tidak menunjang, sulit ditanami jika musim kemarau, dan rata-rata petaninya miskin dan hanya mempunyai luas lahan 0,17 Ha atau ¼ bau⁵. Adapun Gedongtataan yang dipilih karena letaknya relatif dekat ke Pulau Jawa⁶. Areal tersebut

⁵ Jika memerhatikan alasan-alasan seperti ini sebenarnya adalah sekadar penilaian pemerintah Hindia Belanda saja karena kondisi alam Karesidenan Kedu sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Terbukti sampai sekarang potensi di bidang pertanian dan perkebunan salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung (sekarang) ini semakin berkembang. Pemerintah Hindia Belanda tidak mau disalahkan bahwa hasil penilaian mereka terhadap kondisi alam Kedu adalah akibat sistem Tanam Paksa yang di laksanakan sejak masa Van den Bosch (1830-1833) yang menyebabkan kerugian besar di kalangan masyarakat pribumi dan kerusakan keadaan alamnya.

⁶ Tidak diketahui dengan pasti kenapa posisi dekat dengan Pulau Jawa menjadi salah satu alasan penempatan para kolonis tersebut. Jika alasan yang dikemukakan kedekatan dengan pulau asal (budaya asal yaitu Jawa) agar jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti para kolonis tidak betah atau malahan kabur akan dengan mudah mengembalikan mereka ke tempat asal. Tetapi hal ini juga diragukan karena pemerintah kolonial Belanda tentu saja sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan buruk dalam pelaksanaan kolonisasi tersebut. Kenyataannya sampai sekarang masih bisa dijumpai keturunan mantan kolonis yang ada di Gedongtataan maupun wilayah Lampung lainnya. Jika alasan bahwa bisa saja para penduduk setempat akhirnya keberatan wilayah adat mereka diisi dengan para pendatang dengan status menetap dan mengolah lahan, maka ini pun dapat dibantah karena nyatanya sampai sekarang kehidupan dua budaya atau mungkin beberapa budaya berjalan dengan baik walau tidak menutup

⁴ *Raad van Indie* atau *Raad van Nederlands Indie* adalah sebuah dewan yang berkewajiban memberi fatwa atau nasehat (semacam Dewan Pertimbangan Agung sekarang) yang terdiri dari orang-orang Belanda. Dewan ini berkedudukan di Batavia karena fatwanya hanya untuk Gubernur Jenderal. Namun demikian fatwa dari dewan yang beranggotakan 4 sampai 6 orang ini sifatnya tidak mengikat karena segala keputusan ada di tangan Gubernur Jenderal.

di sekitar jalan besar, kontur tanahnya datar, memiliki sumber mata air yang banyak sehingga sangat layak menjadi lokasi percontohan kolonisasi. Proses perpindahan penduduk ini melalui rekrutmen yang dikoordinir oleh Heyting dibantu oleh Asisten Wedana Ronodimedjo, Camat Kutoardjo. Calon kolonis dipilih oleh para bupati dari Karangayar, Kebumen, dan Purworedjo. Ketiga kabupaten tersebut berada dalam wilayah Karesidean Kedu, dan penduduk dari Desa Bagelen (Kabupaten Purworedjo).

Proyek yang dianggap pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Pulau Jawa⁷ dilakukan juga untuk mengatasi bahaya kelaparan yang terjadi di beberapa karesidenan di Jawa seperti di Kedu, Cirebon, Rembang, Kebumen, dan Grobogan. Ini dijadikan suatu bukti bahwa Kerajaan Belanda memiliki kepedulian terhadap wilayah jajahannya terutama Hindia Belanda, padahal berbagai penderitaan dan instabilitas sosial yang muncul di Nusantara selama abad XIX dan puluhan tahun kemudian pada abad XX disebabkan sistem politik jajahan mereka yang berpusat pada mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk yaitu Kerajaan Belanda. Antara 1831 sampai 1866 keuntungan yang dikirimkan mencapai angka f. 500.000.000,- yang dimanfaatkan pemerintah untuk melunasi utang dan perbaikan infrastruktur di wilayah Kerajaan Belanda (Breman, 2014:341). Sedangkan untuk keuntungan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 mencapai

f. 50.000.000,- pada satu komoditi yaitu tanaman kopi (Breman, 2014:304).

Konsentrasi perpindahan penduduk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Karesidenan Kedu dengan jumlah penduduk berfluktuasi pada 1900 mencapai 2.358.545 jiwa, kemudian 1917 mencapai 2.713.517 jiwa, tetapi kemudian menurun pada 1920 menjadi 2.456.591 jiwa (Soedarno, 1996:3). Selama pelaksanaan Politik Etis pemerintahan Hindia Belanda telah melaksanakan perpindahan penduduk yaitu antara tahun 1905 sampai 1941 sebanyak 189.938 orang atau rata-rata 5.133 orang per tahun dengan jumlah tertinggi dilakukan pada tahun 1941 yaitu sebanyak 60.000 orang (Heeren, 1979:8).

Tahun 1905, ketika pemerintah Hindia Belanda melaksanakan *Kolonisatie* di wilayah Karesidenan Lampung, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan sebanyak 155 kepala keluarga asal Desa Bagelen, Karesidenan Kedu. Para migran tersebut ditempatkan di kawasan Gedongtataan. Mereka kemudian mendirikan Desa Bagelen untuk menamai kawasan mereka. Pemandangan pertama atau *kolonisatieproof* diikuti dengan migrasi berikutnya yang berlangsung hingga tahun 1911 dalam masa Gubernur Jenderal A.F.W. Idenburg (1909-1916).

Jadi hanya berlangsung sampai lima kali dan tidak setiap tahun dilaksanakan. Artinya *kolonisatieproof* hanya separuh waktu dari perencanaan Heyting yaitu sekali setiap tahun dalam waktu sepuluh tahun. Migrasi ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda dan para kepala keluarga dibekali bahan makanan (selama satu tahun) dan berbagai perabot rumah tangga seperti piring, mangkuk, meja, kursi, dan alat-alat pertanian.

Perpindahan penduduk ke wilayah Karesidenan Lampung masa Hindia Belanda terbagi dalam tiga sistem dalam kurun waktu berbeda yaitu; sistem yang total dibiayai pemerintah dari tahun 1905 hingga 1911 (setengah waktu dari usulan Heyting yaitu sepuluh tahun), sistem

kemungkinan terjadinya gesekan karena kekurangpahaman terhadap budaya orang atau suku lain.

⁷ W.C. Schalkwijk. *De Kolonisatieproeven in de Lampongsche Districten*. Dalam "Koloniale Studien". Tahun Kedua, Jld. 2, 1918: 418. Lihat juga Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jld. 2, Jakarta: Gramedia, 1990: 32.

pinjaman bank dari tahun 1912-1928, dan sistem *bawon* dari 1932 hingga 1941⁸.

2. *Kokumingakari*

Perpindahan penduduk masa berikutnya berlangsung dalam masa pendudukan pemerintahan militer Jepang 1942-1945, tetapi perpindahan penduduk ini memiliki karakteristik berbeda. Jika pada masa kolonisasi perpindahan penduduk tersebut melibatkan keluarga bahkan bedol desa, maka pada masa ini perpindahan penduduk dilakukan hanya pada individu yaitu orang yang masih muda dan mempunyai kekuatan fisik dan kebanyakan di antara mereka adalah kaum laki-laki. Sebuah hasil penelitian kemudian dijadikan buku dengan judul *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Kurasawa, 1993) mendeskripsikan kondisi pra dan pasca perpindahan penduduk tersebut dan disebutkan bahwa perpindahan penduduk ini adalah dengan sukarela dan setiap orang yang diberangkatkan mendapatkan upah.

Dalam buku tersebut digambarkan bahwa proses perpindahan penduduk itu melalui perekrutan yang melibatkan pejabat pemerintahan lokal setempat (residen) dan melalui pendaftaran dan seleksi, sedangkan bagi yang diterima segera diberangkatkan dan diberi kompensasi berupa upah yang sebagiannya diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan yang dinyatakan tidak diterima tidak diberangkatkan. Dalam buku ini juga disebutkan bahwa ada 2 jenis pengerahan penduduk yaitu yang dipekerjakan di sekitar karesidenan mereka dan yang dipekerjakan ke luar Pulau Jawa bahkan sampai mancanegara. Tetapi keduanya dikenal dengan istilah *Rômusha*.

Rômusha atau romusa adalah bahasa Jepang yang berarti pekerja, tetapi untuk sejarah Indonesia kata ini memiliki

konotasi dengan penderitaan berupa penyiksaan, pelecehan, pemerkosaan, kuli paksa, kelaparan, dan kematian.

Awalnya pengerahan tenaga kerja ini dipropagandai sebagai perekrutan buruh yang akan dipekerjakan di perusahaan-perusahaan swasta sebagai buruh tetap (Kurasawa, 1993:124-125), tetapi setelah pertengahan tahun 1943 di mana kondisi perang Asia Timur Raya yang dilancarkan Jepang sejak 1942 mendapatkan serangan balasan dari Amerika dan sekutu, pengerahan tenaga kerja semakin intensif dan berubah menjadi kuli paksa untuk pembangunan pertahanan. Bahkan pada November 1942 ditandatangani perjanjian oleh para pemimpin Angkatan Laut dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jepang dengan nama *Busshi Kôryûtômi Kansuru Riku Kaigun Genchi Kyôtei* atau pertukaran komoditi dan bahan-bahan di mana tenaga kerja dimasukkan sebagai salah satu komoditi tersebut (Kurasawa, 1993:124). Perjanjian ini kemudian dibuat lebih spesifik lagi pada Juli 1943 antara pimpinan militer Jepang di Jawa (AD ke-16) dengan pimpinan Angkatan Laut di Makassar di mana dalam perjanjian tersebut para *rômusha* lebih mendapat perhatian seperti pembaharuan pasokan tenaga kerja setiap 6 bulan, setiap *rômusha* dibayarkan oleh AL kepada AD sebesar F.5 sebagai biaya perekrutan dan transportasi dari daerah asal, ketentuan upah awal bagi *Rômusha* adalah F.0,50/hari dengan masa kontrak satu tahun, pemberian sarana perumahan bagi para *rômusha*, dan setiap bulan upah para *rômusha* dipotong F.3,00 untuk dikirimkan kepada keluarga mereka (Kurasawa, 1993:125).

Pengerahan *rômusha* ini secara organisasi berada di bawah sebuah seksi di Departemen Urusan Dalam pada Kementerian Dalam Negeri Jepang (*Naimushô*) kemudian berubah menjadi sebuah biro dengan nama *Rômukyoku*. Di tingkat karesidenan penanganan *rômusha* oleh *Naiseibu* atau Seksi Urusan Dalam (Kurasawa, 1993:126). Ini membuktikan

⁸ sejarah.kompasiana.com/2012/07/03/hg-heyting-pimpin-kolonisasi-perdana-ke-lampung-475334.html. Diakses 19 Mei 2014, 10.41 WIB.

bahwa pemerintah Jepang sangat memerhatikan persoalan pengerahan tenaga kerja atau *rômusha* ini. Berbagai fasilitas yang diberikan sebenarnya cukup menjanjikan bagi para *rômusha* dan keluarga yang ditinggalkan. Tetapi fakta sejarah memutarbalikkan semua anggapan baik ini karena justru pada masa pemerintahan militer Jepang yang singkat 1942-1945, eksploitasi kepada para tenaga kerja laki-laki maupun wanita pribumi sangat tidak manusiawi. Banyak di antara mereka yang dikirim jauh dari rumah tidak pernah kembali. Di tempat kerja banyak yang meninggal dunia karena kelaparan, beban kerja yang sangat berat, fasilitas kesehatan yang sangat minim, dan dimasa kemudian terdapat beberapa wanita pribumi yang menyandang gelar mantan *jugun iyanfu* dan diberi kompensasi oleh pemerintah Jepang sebagai tanda “permohonan maaf” untuk peristiwa masa lalu.

Karesidenan Lampung termasuk dalam salah satu tujuan pengerahan *rômusha* yang berasal dari Pulau Jawa dan dikenal dengan nama *kokuminggakari*. Pelaksanaan *kokuminggakari* ini berlangsung dalam pertengahan masa pendudukan Jepang. Pemerintah militer Jepang menyadari bahwa dalam waktu tidak lama konsolidasi negara Amerika Serikat bersama sekutunya (Inggris, Belanda, Australia, dibantu negara-negara persemakmuran Inggris) akan melakukan tindakan pembalasan terutama setelah Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Sikap pemerintah Jepang yang awalnya mengambil hati penduduk pribumi berubah menjadi kewajiban pengerahan manusia untuk mengerjakan proyek perlindungan dan suplai pangan untuk kepentingan militer Jepang seperti penyediaan pangan di daerah Lampung. Penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dibawa ke suatu daerah di Lampung yang diberi nama Toyosawa yang sekarang menjadi Kecamatan Purbolinggo di wilayah Lampung Tengah. Jumlah penduduk yang dipindahkan

sebanyak 12.000 orang⁹. Bandingkan dengan keterangan yang menyebutkan bahwa catatan Disnakertrans, pelaksanaan *kokuminggakari* hanya 1 kali yaitu tahun 1943 yang memindahkan 6.329 KK atau 31.700 jiwa¹⁰.

Pengerahan penduduk sebagai *rômusha* adalah mereka yang tidak terlibat sebagai anggota pasukan dan organisasi yang dibentuk oleh Jepang yaitu: *Gakukotai*, *Heiho*, *Seinedan*, *Fujinkai*, *Putera* (kemudian diganti dengan Jawa *Hokokai*), *Keibodan*, *Jibakutai*, dan *Kempetai*, karena para pasukan ini dipersiapkan untuk menghadapi serangan balasan Sekutu. Nasib para pemuda yang mengalami pelatihan di pasukan-pasukan ini lebih baik daripada para *Rômusha*, makanan, pakaian, dan kesehatan mereka lebih baik hanya saja harus berlatih ilmu perang dengan sangat keras mengingat waktu untuk pengerahan pasukan bantuan untuk pemerintah militer Jepang ini sangat singkat. Rencananya mereka akan dikerahkan untuk menghadapi serangan sekutu. Sayangnya rencana Jepang ini gagal karena Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom oleh Amerika. Bahkan pasukan PETA bentukan Jepang melakukan pemberontakan di Blitar. Beberapa markas militer Jepang juga diserang bekas anggota pasukan bentukan mereka untuk merebut berbagai senjata. Senjata-senjata itu kelak digunakan untuk melawan tentara Belanda yang berencana mengambilalih Indonesia dari tangan Jepang.

3. Transmigrasi

Setelah kemerdekaan istilah kolonisasi yang dianggap berbau penjajahan apalagi istilah *rômusha* dan *kokuminggakari* dihapuskan menjadi

⁹ <http://www.thesiswonoconcern.com/ts/?p=100>, 50 Tahun Penyelenggaraan Transmigrasi. Diakses 15 April 2012, 09.32 WIB.

¹⁰ sejarah.kompasiana.com/2012/07/03/hg-heyting-pimpin-kolonisasi-perdana-ke-lampung-475334.html. Diakses 19 Mei 2014, 10.41 WIB.

transmigrasi. Istilah transmigrasi mulai diberlakukan sejak tahun 1950 dan dianggap sebagai sarana pembangunan yang penting sehingga ketentuan-ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam GBHN disebutkan perpindahan penduduk yang lebih dikenal dengan transmigrasi bertujuan untuk penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi dan pertanian dalam pembangunan daerah. Peningkatan taraf hidup para transmigran dan masyarakat sekitarnya menjadi prioritas pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara rasional (Budiman, 1985:170).

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973, transmigrasi dibagi dalam 2 jenis, yaitu transmigrasi umum dan swakarsa. Dalam PP ini pembiayaan pelaksanaan transmigrasi umum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan transmigrasi swakarsa pembiayaannya ditangani oleh para transmigran atau pihak lain (Rukmadi *et al.*, 1984:1). Dalam perkembangannya jenis transmigrasi ini bertambah yaitu transmigrasi lokal, sisipan, pramuka, dan bedol desa (Sujarwadi, dalam Rukmadi, *et al.*, 1984:1). Pembentukan beberapa jenis transmigrasi ini menjadi gambaran perkembangan program transmigrasi dimana awalnya seluruh kegiatan dikelola dan dibiayai oleh pemerintah, kemudian berkembang menjadi biaya sendiri atau melalui APBD dan yayasan-yayasan lainnya.

Masalah yang dihadapi pemerintah Republik Indonesia sehingga perlu untuk melaksanakan transmigrasi adalah untuk mengurangi perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah di Jawa yang mencapai angka 0,124 Ha dibagi jumlah penduduk. Tahun 1961 setelah diadakan pencatatan penduduk hasilnya untuk Pulau Jawa dan Madura mencapai angka 63 juta jiwa kemudian meningkat menjadi 75 juta jiwa pada tahun 1971. Tahun 1973 jumlah penduduk pulau Jawa mencapai 80.187 juta jiwa atau 64 % dari seluruh penduduk

Indonesia, sedangkan pada tahun 1961 jumlah penduduk di luar Jawa dan Madura hanya 34 juta jiwa dan pada 1971 sebanyak 40 juta jiwa. Akibatnya banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan sedangkan di luar Jawa banyak tanah atau lahan yang belum digarap (Yayasan Mahasiswa Tridharma, 1981:24-27). Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan berbagai kampanye tentang pentingnya perpindahan penduduk untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui program transmigrasi.

Pada masa Orde Baru kebijakan transmigrasi tertuang dalam program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yaitu; Pelita I kebijakan transmigrasi dikaitkan dengan usaha pembangunan pedesaan, berbeda pada masa-masa sebelumnya yang berfokus pada bagaimana cara mendistribusikan penduduk. Pelita II calon transmigran dikembangkan tidak melulu para petani tetapi kalangan veteran juga mendapat kesempatan melalui program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1951 tanggal 12 Februari 1951. Pelita III orientasi transmigrasi adalah persebaran penduduk dan membangun masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah asal dan daerah transmigrasi (Budiman, 1985:2).

Sampai dengan tahun 1955 telah ditransmigrasikan sebanyak 5.491 Kepala Keluarga ke Lampung Selatan. Tahun 1955 sampai 1969 dipindahkan lagi sebanyak 5.333 Kepala Keluarga yang ditempatkan di lokasi transmigrasi seperti Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjungan, dan Kecamatan Kedaton. Tahun 1974 kembali ditransmigrasikan sebanyak 874 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kecamatan Palas dan Kecamatan Panengahan.

Sejak tahun 1979/1980 Lampung sudah tidak menerima penempatan transmigran. Kalaupun ada penduduk yang ditransmigrasikan itu merupakan sisa proyek transmigrasi pada tahun-tahun sebelumnya yang baru dapat direalisasikan

pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada kurun tahun 1980/1981 menjadi masa pembinaan bagi para transmigran saja. Sebagai gambaran perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 1. Realisasi Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Lampung Selatan dan Tengah Tahun 1970/1971 hingga 1976/1977.

No	Tahun	KK/Jiwa	Lamsel	Lamteng
1	1970/1971	KK	141	218
		Jiwa	720	946
2	1971/1972	KK	77	106
		Jiwa	437	417
3	1972/1973	KK	-	362
		Jiwa	-	1.736
4	1973/1974	KK	874	1.237
		Jiwa	3.903	5.238
5	1974/1975	KK	54	117
		Jiwa	227	829
6	1975/1976	KK	13	20
		Jiwa	72	97
7	1976/1977	KK	8	98
		Jiwa	42	435

Sumber: Kanwil Ditjen Transmigrasi Povinsi Lampung (BPS Provinsi Lampung 1971-1978).

Tahun Anggaran 1976/1977 menjadi akhir pengiriman transmigrasi untuk wilayah Lampung Selatan dan Lampung Tengah, sedangkan Lampung Utara masih berlanjut hingga tahun 1979/1980, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Penempatan Transmigrasi di Lampung Utara Tahun 1970/1971 hingga 1979/1980.

No	Tahun	KK/Jiwa	Lam. Ut
1	1970/1971	KK	873
		Jiwa	4.241
2	1971/1972	KK	1.346
		Jiwa	5.910
3	1972/1973	KK	2.398
		Jiwa	10.772
4	1973/1974	KK	6.605
		Jiwa	30.370
5	1974/1975	KK	1.242
		Jiwa	5.717
6	1975/1976	KK	1.100
		Jiwa	4.778
7	1976/1977	KK	524
		Jiwa	2.346
8	1977/1978	KK	350

9	1978/1979	Jiwa	1.490
		KK	1.650
10	1979/1980	Jiwa	7.068
		KK	1.815
		Jiwa	8.071

Sumber: Kanwil Ditjen Transmigrasi Povinsi Lampung (BPS Provinsi Lampung 1971-1981).

Total pengiriman transmigran dari tahun 1970/1971 hingga 1979/1980 sebanyak 31.036 KK atau 91.470 jiwa.

Penempatan transmigran di Lampung kembali dilaksanakan pada tahun anggaran 1981/1982 dengan realisasi sampai dengan tahun 1985/1986 telah ditempatkan sebanyak 40.750 Kepala Keluarga atau 166.713 jiwa.

Perpindahan penduduk pada 1950 dikelola oleh suatu lembaga yang disebut "Jawatan Transmigrasi" yang berada di bawah Kementerian Sosial. Tahun 1960 jawatan ini kemudian berubah menjadi sebuah departemen bernama Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Tahun 1978 berada di lingkungan Menteri Muda Urusan Transmigrasi dan tahun 1980 di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

4. Dampak Perpindahan Penduduk

Meski dengan kepentingan politis, yaitu untuk pemenuhan tenaga kerja terutama pembukaan lahan baru, peristiwa migrasi penduduk ataupun transmigrasi menjadi salah satu penyebab terwujudnya multikultur di suatu daerah. Perpindahan penduduk dari daerah asal yang beretnis tertentu ke daerah tujuan yang memiliki etnis tersendiri dalam proses bermasyarakat menimbulkan pembauran dalam aktivitasnya atau tercipta keadaan budaya yang homogen. Pembauran ini adalah proses sosial alami. Perbedaan sifat dan sikap saling bertemu mencari kesesuaian dalam interaksi untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Akan tetapi persoalan budaya memiliki perbedaan yang signifikan. Budaya masyarakat pendatang berbeda dengan budaya masyarakat setempat dan dalam praktiknya masing-

masing etnik melaksanakan budaya sesuai dengan anutan/pakem masing-masing, sehingga sangat sulit disatukan, tetapi dalam interaksi untuk menyatukan kondisi ini dibutuhkan suatu integrasi sehingga menciptakan homogenitas. Inilah yang disebut kesepahaman di balik perbedaan tersebut.

Di wilayah Kota Metro sekarang, pasca penempatan penduduk di Desa Trimurjo oleh para kolonis yang termasuk dalam Kewedanaan Sukadana, yaitu Marga Unyi dan Buay Nuba, dewan adat melaksanakan sebuah rapat yang kemudian menyepakati agar wilayah kolonisasi tersebut dibebaskan dari status milik marga¹¹. Peristiwa ini terjadi pada 17 Mei 1937.

Jika memerhatikan rentang waktu sejak *Kolonisatieproof* di Gedongtaan yang sudah berusia 109 tahun nampaknya tidak ada masalah. Dalam rentang waktu tersebut perkembangan Gedongtatan (sekarang menjadi salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pesawaran) semakin pesat menjadi sebuah kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan warganya.

Dampak lain adalah telah terjadi pencampuran penganut budaya pada satu tempat yang luas atau terjadi multikulturalisme yang disebabkan pelaksanaan program pemerintah, yaitu *Kolonisatie* dan transmigrasi. Saling

pengertian sudah terjalin sedemikian rupa, perkawinan campuran juga telah terjadi, beberapa sektor birokrasi di tingkat kecamatan dan kabupaten terjadi percampuran etnis dengan harmonis. Kesimpulannya kehidupan multikultur telah terjalin dengan semestinya. Dari kondisi ini kekuatiran terhadap akan terjadinya disintegrasi multikultur tampaknya tidak mungkin, selama kehidupan berjalan “seimbang” antara penduduk asli dengan pendatang. Semuanya pun sepakat menyebut diri sebagai orang Lampung seperti terjadi di Bandar Lampung, Kalianda, Kotabumi dan sebagainya.

Kontribusi lain adalah terbangunnya prasarana fisik, seperti jalan, jembatan, dan gorong-gorong, lahan usaha pertanian dan berbagai sarana lain (perumahan, SD, puskesmas, serta koperasi). Program transmigrasi juga memberikan perluasan lapangan kerja khususnya di bidang pertanian serta terbentuknya pasar yang mengakomodasi berbagai keperluan penduduk setempat dan para transmigran.

Pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung. Baik di tingkat kabupaten, kecamatan, yang semuanya bermula dari desa-desa transmigrasi umum. Sampai dengan tahun 2006, pemukiman transmigrasi yang telah diintegrasikan menjadi desa meliputi 387 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Jumlah desa tersebut telah memotivasi perkembangan dan pertumbuhan 377 desa bekas transmigrasi dari 2196 desa di wilayah Provinsi Lampung. Demikian pula pertumbuhan dan pemekaran 51 kecamatan dari 180 kecamatan yang ada. Pemekaran dan pertumbuhan itu pada akhirnya mendukung terjadinya pemekaran lima kabupaten, yakni Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, serta Kabupaten Tanggamus, dan satu kota, yaitu Kota Metro.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah tersebarnya penduduk secara teratur

¹¹ Marga terdiri dari beberapa kampung yaitu dikepalai oleh Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku diangkat dari tiap-tiap suku di kampung itu. Kepala Kampung dipilih oleh penimbang-penyimbang dalam kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus penimbang kampung, kalau bukan penimbang kampung tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga. Marga dikepalai oleh pesirah, selain berkedudukan sebagai kepala marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penimbang-penyimbang Kampung dalam marganya masing-masing. http://metrokota.go.id/statis_detail.php?no=98 Diakses 28 Juli 2011.

dan terorganisasi melalui pengelolaan oleh pemerintah baik pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia. Perpindahan penduduk secara terorganisasi ini menggunakan calon transmigran yang sudah memiliki pengalaman sehingga di tempat baru mereka dapat segera melaksanakan pengetahuannya terutama di bidang pertanian. Ini yang membedakan dengan imigrasi yang tidak dikelola dengan teratur yang mana para migrannya tidak memiliki cukup pengalaman. Imigran seperti ini dapat ditemui di kota-kota besar biasanya dalam bentuk individu dan kelompok. Imigran dalam bentuk kelompok biasanya terdiri atas para pengungsi dari negara lain.

D. PENUTUP

Kolonisatieproof lalu kolonisasi, pengerahan rômusha, dan transmigrasi adalah program perpindahan penduduk pemerintah yang pernah dijalankan di wilayah yang sama dengan nama berbeda yaitu Hindia Belanda, Indonesia masa pendudukan Jepang, dan Republik Indonesia. Ketiga kegiatan tersebut sama-sama menilai bahwa penduduk Jawa melebihi kapasitas dalam jumlah dibanding luas lahan garapan. Meski dengan alasan masing-masing, ketiganya menganggap bahwa para kolonis, *rômusa*, dan transmigran adalah komoditi utama dalam rangka membangun sarana fisik di daerah yang kekurangan jumlah tenaga kerja tetapi memiliki luas lahan yang melimpah. Ketiga program perpindahan penduduk ini pun bersifat pengkonsolidasian tenaga kerja produktif untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian karena ketiganya adalah perogram pemerintah maka mulai dari pra penyelenggaraan hingga penempatan dibiayai oleh pemerintah.

Perbedaannya jika kolonisasi dan transmigrasi bertujuan untuk menyebarkan penduduk dan membuka lahan baru, *kokuminggakari* bertujuan untuk pengerahan tenaga kerja murni. Jika pada masa kolonisasi dan transmigrasi perpindahan penduduk beserta

keluarganya, pada masa *kokuminggakari* hanya kaum pekerja yang dipindahkan tanpa keluarga turut serta. Karena perbedaan tersebut, apa yang dialami para emigran juga turut berbeda. Meskipun beberapa kolonis dan transmigran pernah ada yang meninggalkan lahan mereka dan kembali ke daerah asal, tetapi jumlah yang tetap menetap lebih banyak bahkan telah menjadi warga setempat. Adapun para romusha hampir semuanya kembali ke daerah asal kecuali mereka yang meninggal di tempat kerjanya.

Dari perkembangan yang dialami, nyatalah manfaat yang diperoleh para migran, mampu meningkatkan taraf hidupnya terbukti bahwa sejak tahun 1905 belum ada berita bahwa mereka yang dikolonisasi di Gedongtataan akhirnya kembali ke daerah asal di Pulau Jawa karena mereka lebih menderita di perantauan, meski di daerah lainnya ada yang melarikan diri. Bahkan mereka menjadi salah satu pionir pembuka lahan pertanian dan perkebunan. Setelah menetap sekian lama jumlah mereka bertambah, baik yang berasal dari kedatangan rombongan transmigrasi berikutnya juga pertambahan tersebut berasal dari keturunan mereka sendiri. Ini berarti kontribusi bagi sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Kontribusi bagi pemerintah daerah, adanya kolonisasi/migrasi kemudian transmigrasi menjadikan Provinsi Lampung sebagai daerah terbuka dan manfaat nyata adalah dibangunnya sarana dan prasarana pembangunan daerah seperti jalan-jalan yang menjadi jalur distribusi perekonomian. Selain itu berkembang tidaknya suatu daerah/kawasan juga ditunjang oleh kesediaan daerah tersebut untuk terbuka menerima berbagai unsur dari luar, tetapi dengan ketentuan bahwa unsur-unsur budaya asli/setempat yang adiluhung layak dipertahankan dan dilestarikan. Demikian pula halnya dengan unsur budaya dari luar, sekalipun akan terjadi pembauran namun budaya adiluhung dari tempat asal juga patut

dilestarikan. Karena sekalipun berbeda dalam penerapan budaya, sesungguhnya nilai-nilai budaya yang beragam tersebut bermuara pada satu tujuan yaitu tercapainya ketentraman dan keselarasan.

Pembauran suku-suku bangsa di Lampung menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia bahwa ternyata beragamnya suku bangsa dapat meminimalisasi konflik antargolongan/suku baik antara penduduk asli dengan pendatang maupun di antara para pendatang itu sendiri. Ini disebabkan adanya saling pengertian di antara suku bangsa tersebut berupa sikap menerima dari suku asli dan sikap bersedia mengikuti aturan yang berlaku bagi suku pendatang. Kedatangan para migran/transmigran yang disertai kelengkapan sarana penunjang aktivitas membuat situasi dapat kondusif, sebab perhatian para pendatang terkonsentrasi pada penggarapan pekerjaan mereka sebagai petani di atas lahan yang telah tersedia. Bagi penduduk asli pemilik lahan marga para pendatang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai buruh-buruh tani yang berarti secara sosialis terjadi saling ketergantungan yang dapat menjadi perisai terjadinya konflik komunal.

Kesediaan orang Lampung menerima para pendatang di tengah-tengah mereka juga patut dihargai, karena sekalipun berbeda latar belakang budaya, ternyata mereka dapat beradaptasi. Di masa kini para keturunan kolonisasi ataupun transmigrasi sudah mengakui diri sebagai warga setempat atau telah menjadi "Orang Lampung".

Salah satu bagian penting dari pelaksanaan perpindahan penduduk di masa lalu adalah dibangunnya Museum Transmigrasi di wilayah Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Tujuan pembangunan ini selain sebagai monumen peristiwa perpindahan penduduk juga dapat dijadikan sebagai pusat riset tentang mobilitas individual maupun kolektif dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Riset ini dapat menjawab pertanyaan secara ilmiah

tentang mengapa orang pindah atau butuh pindah. Jawaban hasil riset tersebut dapat digunakan dalam rangka pembangunan suatu daerah terutama daerah tujuan. Demikian pula riset tentang riset tentang pembauran dan dampaknya, sehingga kasus amuk massa yang dilaterbelakangi ketersinggungan sukuisme demikian pula yang hanya mementingkan urusan kelompok/golongan dapat diminimalisasi.



Gambar 1. Museum Nasional Ketransmigrasian
Desa Bagelen, Kecamatan
Gedongtataan, Kabupaten
Pesawaran.

Sumber: M. Halwi Dahlan.

Kesadaran sebagai bangsa yang satu patut ditingkatkan bersamaan dengan lestari dan berfungsinya tradisi-tradisi. Demikian halnya dengan otonomi daerah jangan diartikan sebagai hak untuk mengisolasi diri. Pemerintah Daerah hendaknya menjaga keseimbangan sosial untuk mencegah terjadinya disintegrasi.

DAFTAR SUMBER

1. Makalah

Schalkwijk, W.C. 1918.

De Kolonisatieproeven in de Lamongsche Districten. Dalam "Koloniale Studien". Tahun Kedua, Jld. 2,

Sudarno. 1996.

Kolonisasi di Gedongtataan (Lampung) Tahun 1905-1917. Makalah untuk Kongres Nasional Sejarah Tahun 1996. Jakarta: Ditjarahnitra.

2. Buku

- Budiman, Arief. Ed. 1985.
Transmigrasi di Indonesia. Ringkasan Tulisan dan Hasil-hasil Penelitian. Jakarta: Gramedia.
- Breman, Jan. 2014.
Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gottschalk, Louis. 1986.
Understanding History: A Primer of Historical Method, atau *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Cet. V. Jakarta: UI Press.
- Heeren, H.J. 1979.
Transmigrasi di Indonesia. Terj. Hans Daeng dan Wille Koen. Jakarta: Gramedia.
- Heyting, H.G. 1938.
De Les van Wortelvast Gedongtataan. Dalam "De Indische Gids". Tahun ke-60, Jld. 2.
- Kartodirdjo, Sartono, dan Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1973.
Sejarah Nasional Indonesia. Jilid V. Jakarta Depdikbud.
- _____. 1990.
Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Jld. 2, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1999.
Pengantar Ilmu Sejarah. Cet. III. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kurasawa, Aiko. 1993.
Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta: Grasindo
- Suriadiningrat, Bayu. 1981
Sejarah Pemerintahan di Indonesia. Babak Hindia Belanda dan Jepang. Jakarta: Dewaruci Press.
- Susanto, Astrid S. 1985.
Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Cet V. Jakarta: Binacipta.
- Warsito, Rukmadi, Sujarwadi, Kustadi, Indriyati Eko Purwaningsih, Chodidah Budi Raharjo, S. Imah Afwan, Sri Sumarni, Arief Budiman. 1984.

Transmigrasi, dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman. Jakarta: Rajawali.

- Yayasan Mahasiswa Tridharma. 1981.
Pemikiran Mahasiswa dan Intelektual Menghadapi Ledakan Penduduk" Jakarta: Yayasan Mahasiswa Tridharma.

3. Internet

- sejarah.kompasiana.com/2012/07/03/hg-heyting-pimpin-kolonisasi-perdana-ke-lampung-475334.html. Diakses 19 Mei 2014, 10.41 WIB.
- http://metrokota.go.id/statis_detail.php?no=98, Hari Jadi Kota Metro. Diakses 28 Juli 2011, pukul 10.23 WIB.
- <http://www.thesiswonoconcern.com/ts/?p=100>, 50 Tahun Penyelenggaraan Transmigrasi. Diakses 15 April 2012, 09.32 WIB.